

**DATA PENDUKUNG RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN ESELON I
KEMENTAN,
DIHADIRI ID FOOD DAN PERUM BULOG
4 APRIL 2022**

I. CATATAN ANGGOTA RAKER KEMENTAN

- ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

- a. Belum ada pejabat Eselon 1 Ditjen Perkebunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- b. Eselon 1 harus di evaluasi
- c. Balitbang, diperlukan perhatian karena beberapa akan pindah ke BRIN
- d. Jika Kementerian Pertanian membuat Peraturan wajib membagikan kepada Komisi IV DPR RI
- e. Infrastruktur Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit seharusnya mendapat dukungan anggaran dari BPDPKS. Dirjen Perkebunan memiliki wewenang besar terhadap program PSR dan seharusnya dapat mengusulkan kepada BPDPKS terkait hal tersebut
- f. Meminta Permentan 3 Tahun 2022 dicabut (terkait dengan dihapusnya rekomtek Kementerian Pertanian)
- g. Beberapa petani di wilayah produktivitas sawit yang tinggi masih takut mengikuti asuransi PSR, meminta dukungan dari Pemerintah
- h. Komisi IV DPR RI perlu mendukung terbentuknya Pansus minyak goreng
- i. Dibutuhkan sosialisasi pemanfaatan asuransi pertanian secara meluas
- j. Pemerintah diharapkan untuk segera konsultasi ke Kemenkeu terkait dengan HET pupuk non subsidi/komersil
- k. Solusi untuk petani tebu yang tidak mendapatkan pupuk subsidi jenis ZA apabila rekomendasi Panja Tahun 2021 sudah terlaksana
- l. Perlu ada monitoring dan tindakan massif dalam rangka menjamin ketersediaan pangan hingga bulan Mei (menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri)

- m. Kementerian Pertanian perlu melakukan mitigasi resiko terkait dengan pangan karena prediksi pangan sangat bergantung pada permasalahan pupuk, anomali cuaca, kondisi Internasional, dll
- n. Perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan kedelai dan bawang putih. Tahun 2020-2021 Komisi IV DPR RI telah menekankan terkait dengan kedelai (karena terjadi masalah pada impor) dan Komisi IV DPR RI juga mempertanyakan RIPH untuk importir bawang putih.
- o. Dibutuhkan Grand Design dari Kementan terkait dengan kedelai
- p. Harga untuk daging ayam, tidak dinikmati oleh Peternak
- q. Berapa kebutuhan final stock? Apakah impor GPS berdasarkan permintaan yang mengajukan atau kebutuhan stok? Minta data kebutuhan Nasional
- r. Meminta perhatian untuk produksi sapi, babi, dan ayam yang terkena penyakit di Provinsi NTT agar dapat mengurangi impor

- **PERUM BULOG**

- a. Perum Bulog perlu diperkuat karena kemampuannya terbatas
- b. Terkait dengan Rekomendasi Ombudsman terhadap aturan CBP Perum Bulog, diharapkan diperjelas (Kementerian Pertanian harus memperhatikan rekomendasi tersebut)
- c. Pemerintah diharapkan untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyerap hasil kedelai lokal. Disamping itu, impor harus dilakukan oleh Perum Bulog (bukan swasta). Perum Bulog harus diberikan akses dan tidak diberikan pembiayaan komersil (terkait kegiatan stabilisasi harga dan pasokan pangan)
- d. Pemerintah seharusnya memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk stabilisasi minyak goreng karena Perum Bulog memiliki akses ke Seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Perum Bulog harus memiliki stok minyak goreng dan perlu adanya pabrik minyak goreng
- e. Ada kekosongan kewenangan di Perum Bulog, perlu dibicarakan dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog harus digunakan untuk stabilisasi Pangan Nasional

II. RESUME RDPU KOMISI IV DPR RI TENTANG PANGAN

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan dari AIMI dan GIMNI terkait permasalahan tata kelola minyak goreng yang akan dijadikan bahan pendalaman pada rapat berikutnya dengan Pemerintah, dengan beberapa point diantaranya :
 - a. Terdapat 72 pabrik minyak goreng di Indonesia dimana sebanyak 36 tergabung di GIMNI dan 6 tergabung di AIMI, sementara sisanya tidak tergabung di asosiasi.
 - b. Jumlah produksi minyak goreng secara keseluruhan sebesar 398 ribu kilo liter dengan jumlah kebutuhan rata-rata sebesar 319 ribu kilo liter per bulannya. Artinya Jumlah volume minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen minyak goreng nasional jumlahnya melebihi kebutuhan pasar di dalam negeri
 - c. Kenaikan harga minyak goreng karena naiknya harga minyak sawit dunia yang sangat tinggi. Apabila harga minyak sawit Rp 15.000 maka harga keekonomian minyak goreng sebesar Rp 25.000.000 per liternya.
 - d. Masih terdapat agen/distributor yang belum memiliki NPWP, sehingga perlu upaya pengendalian dan mengontrol peredaran minyak goreng subsidi sampai pada sasaran
 - e. Penerbitan DMO/ DPO oleh pemerintah menyebabkan hanya perusahaan yang mengimpor CPO saja yang mengalokasikan CPO sebagai bahan baku minyak goreng. Kondisi ini menyebabkan pasokan bahan minyak goreng untuk pabrik di dalam negeri menjadi berkurang.
 - f. Kelangkaan minyak goreng karena terdapatnya disparitas harga yang besar antara harga keekonomiannya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan kontrol yg sangat kuat dari pemerintah apabila harganya ingin sesuai dengan keinginan pemerintah.
 - g. Asosiasi minyak goreng menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan minyak goreng yang lebih berpihak kepada pasar domestik. Disamping itu, mengusulkan agar pemerintah berpihak kepada BUMN untuk menjadikan *price leader* salah satunya dengan membangun kebun sawit seluas 2 juta hektar sebagai sumber bahan baku pangan utama terutama untuk minyak sawit.
 - h. Terobosan ke depan minyak goreng premium agar harganya di lepas saja oleh Pemerintah. Sedangkan untuk minyak goreng subsidi agar diawasi dengan ketat peredarannya.

- i. Sistem informasi minyak sawit nasional.

III. CATATAN KUNKER SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Kendala Pengadaan di Perum Bulog yang timbul, antara lain:
 - a) Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
 - b) Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.
- Kontribusi ID Food setelah peraturan DMO/DPO dicabut
 - a) ID Food menjadi distributor minyak goreng curah
 - b) Sumber minyak goreng berasal dari principal yang tidak mempunyai jalur distribusi domestic
 - c) ID Food berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tetap mendistribusikan minyak goreng curah
- Ringkasan temuan di Lapangan
 - a) Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak terlalu signifikan, artinya masih diatas kewajaran bahkan ada yang lebih murah dibandingkan dengan minggu lalu namun perlu waspada adanya kenaikan saat bulan puasa yang biasanya menjadi 3-4 kali kenaikannya
 - b) Minyak goreng curah pada saat kunjungan di pasar stoknya kosong, namun berbeda dengan beberapa hari yang lalu dimana stoknya masih tersedia
 - c) Terdapatnya "Minyak Goreng Kemasan Sederhana" dikemas menjadi minyak goreng premium, hal ini melanggar aturan mengingat minyak goreng sederhana levelnya di bawah minyak goreng premium
 - d) Beras dan daging mengalami peningkatan harga, hal ini menjadi konsen dari Komisi IV DPR RI agar ada antisipasi sehingga konsumen mendapatkan harga yang ramah dan ketersediaanya cukup dan aman
 - e) Jalur distribusi komoditas jagung wilayah Sumatera dan Bangka Belitung perlu diwaspadai Perum Bulog karena berbagai daerah ditemukan adanya kelangkaan atau habis ketersediaanya. Hal ini penting karena Bulog memiliki peran yang lebih besar terkait distribusi

Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI meminta Satgas Pangan, Pemerintah dan BUMN untuk dapat mengkondisikan stabilitas harga pangan di pasar tradisional yang relatif cukup baik, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta aspek pemantauan ketersediaan pangan sejak awal bulan ramadhan hingga paska idul fitri senantiasa dipertahankan dan dijaga.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Satgas Pangan, Pemerintah dan BUMN untuk mendorong produsen minyak goreng untuk memperhatikan peta ketersediaan minyak goreng curah yang langka di pasaran sebagai langkah antisipatif memperbaiki jalur logistik distribusinya.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Satgas Pangan, Pemerintah dan BUMN untuk menindak tegas pelaku oknum kecurangan yang mengemas minyak goreng curah menjadi minyak goreng sederhana/premium, mengingat saat sidak ke pasar tradisional ditemukannya hal tersebut.
- d. Komisi IV DPR RI meminta Satgas Pangan Sumsel selalu berkomitmen berkordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian serta Bulog, dan produsen untuk melakukan pengawasan, penyidikan, penindakan, dan juga operasi pasar terhadap komoditas kebutuhan pokok

2. PROVINSI JAWA TIMUR

- Pasokan minyak goreng curah sudah mulai tersedia walaupun masih terbatas ketersediaannya. Sebelumnya, pedagang mengeluhkan bila pasokan minyak goreng curah tersedia setiap 3 minggu sekali sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang terkadang membeli ke pihak ketiga dengan harga yang tinggi. Harapannya, Pemerintah dapat mengirimkan minyak goreng curah setiap minggunya.
- Ketersediaan komoditas telur masih stabil namun Harga telur mengalami peningkatan. Umumnya harga telur berada dikisaran Rp24.000/kg (harga distributor sebesar Rp23.000/kg), dikarenakan menjelang bulan Ramadhan, harga mengalami peningkatan menjadi Rp25.000/kg.
- Ketersediaan komoditas masih stabil namun Harga bawang putih dan bawang merah mengalami peningkatan.

- Mengalami peningkatan harga, sebelumnya Rp12.500 dan saat ini menjadi Rp13.500-Rp14.000
- Harga daging ayam sudah mulai terasa peningkatannya walaupun ketersediaan masih aman dan banyak dibutuhkan masyarakat
- Pedagang tetap menjual tempe sesuai dengan ukuran walaupun harga harus mengalami peningkatan
- Cabai merah besar dan rawit juga mengalami peningkatan harga
- Ketersediaan daging sapi cukup dan harga masih stabil Rp100.000- Rp120.000/kg (untuk jenis tertentu). Pedagang mengeluhkan bahwa kendala dari komoditas daging sapi adalah distribusi yang terhambat sehingga diharapkan Pemerintah untuk menjaga stok sapi jangan sampai kurang
- Kehadiran Perum Bulog sangat dibutuhkan pedagang untuk menstabilkan harga dan pasokan yang sangat dibutuhkan pasar

Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a) Ketersediaan Pangan di Provinsi Jawa Timur masih mencukupi, namun perlu ada perbaikan distribusi dan perdagangannya masih belum sempurna;
- b) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menjaga *supply chain* di kota Surabaya karena kota Surabaya merupakan salah satu kota besar dan menjadi episentrum perdagangan di Kawasan Timur Indonesia;
- c) Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan/ID FOOD agar tidak hanya melakukan trading/impor pangan saja, melainkan turut andil dalam penyediaan (produksi) dalam negeri dengan melibatkan masyarakat dan petani sehingga lebih sejahtera;
- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk selalu memperhatikan kondisi perkembangan dunia seperti konflik antara Rusia dan Ukraina serta memperhitungkan dampaknya terhadap persoalan pangan, sehingga antisipasi persoalan pangan yang muncul dapat dipersiapkan lebih cepat;
- e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperhatikan pangan dan tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kelaparan akibat kenaikan harga pangan;
- f) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak menjadikan kenaikan harga pangan sebagai alasan untuk melakukan importasi bahan pangan. Oleh karena

- itu, Pemerintah harus lebih cermat dan tepat dalam memperhitungkan permintaan dan ketersediaan stok pangan;
- g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas harga gabah dan hasil pangan lainnya yang diproduksi petani Dalam Negeri sehingga minat dan jumlah masyarakat untuk Bertani tidak berkurang/turun;
 - h) Terkait dengan rencana importasi daging kerbau oleh Pemerintah, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk lebih hati-hati terhadap negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjamin mutu dan keamanan daging yang diimpor dari negara asal; dan
 - i) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan Badan Penyedia Pangan (Badan Pangan Nasional) untuk tidak hanya menggunakan pendekatan bisnis terhadap penyediaan pangan untuk masyarakat, tetapi juga menggunakan pendekatan perlindungan.

3. PROVINSI JAWA TENGAH

- Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran bahwa secara umum harga pangan di Pasar Bulu Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi stabil dan beberapa komoditas yang sempat mengalami kenaikan saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga pada 1 (satu) minggu yang lalu. Namun, jika mengacu kepada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga akan kembali meningkat H-7 Lebaran seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
- Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran bahwa stok pangan di Jawa Tengah pada bulan Ramadhan sampai Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan aman.
- Komisi IV DPR RI memahami kendala yang dihadapi Perum Bulog. Perum Bulog tidak dapat melakukan kegiatan jual-beli beras secara bebas, Hal ini berdampak kepada CBP yang tersimpan lama dan tidak dapat dilepas ke pasar sebelum ada penugasan, sementara itu beras yang disimpan dapat mengalami penurunan mutu. Pada saat kunjungan muncul wacana agar CBP berupa gabah, dan tim kunjungan menyepakati bahwa perlu ada disposal policy bagi Perum Bulog, untuk beras-beras yang sudah tersimpan lama di Gudang.

Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV meminta agar Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak, baik Pemerintah

(Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian) dan swasta. Tingginya harga di tingkat konsumen, namun tidak dinikmati oleh produsen (petani/peternak), menggambarkan buruknya tata kelola distribusi pangan dalam negeri.

- b. Komisi IV meminta kepada Pemerintah agar menjaga harga yang menguntungkan baik di petani, pedagang, dan konsumen; dengan proporsi harga yang tepat. Serta mampu melakukan antisipasi gejolak harga pangan dengan memperbaiki mekanisme dan tata kelola distribusi pangan.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk melakukan inovasi agar penyimpanan beras tidak gampang rusak, serta menghitung masa awet beras, untuk kemudian dilakukan reproses ketika beras mengalami penurunan mutu dan kualitas.
- d. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian, Bulog, ID FOOD dan Badan Pangan Nasional untuk saling melakukan koordinasi terkait stok pangan dan untuk menyatukan persepsi terkait data agar tidak tumpang tindih.
- e. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian dan BULOG untuk tidak melakukan impor beras.
- f. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan impor apabila stok pangan dalam negeri masih cukup.

IV. ARTIKEL MEDIA



Sumber: <https://hargapangan.id/>

1. Berdasarkan data harga rata-rata perubahan yang ditampilkan oleh <https://hargapangan.id/>, per 1 April 2022 untuk harga bawang putih, cabai

merah keriting, minyak goreng kemasan, gula pasir, daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam mengalami peningkatan.

2. Di rapat internal, Satgas Pangan Polri ungkap Gula-Daging sapi Masih Impor

(<https://news.detik.com/berita/d-6008918/di-rapat-internal-satgas-pangan-polri-ungkap-gula-daging-sapi-masih-impor>)

Satgas pangan beserta *stakeholder* terkait akan mencari cara guna menyelesaikan masalah impor kebutuhan pokok. Ada 3 cara dalam mengatasi masalah tersebut, antara lain:

- Terkhusus minyak goreng pihaknya bersama pemerintah sedang melakukan upaya stabilisasi, pengawasan dan pendistribusiannya.
- Kerja keras dan kerja sama dengan seluruh menjadi jaminan kestabilan harga pangan
- Satgas Pangan Polri baik di pusat maupun daerah terjun langsung melihat kondisi ke masyarakat.

3. Impor Daging Sapi capai 96%, Eric Thohir: Stok Dalam Negeri Memprihatinkan

(<https://www.inews.id/finance/bisnis/impor-daging-sapi-capai-96-persen-erick-thohir-stok-dalam-negeri-memprihatinkan>)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyoroti impor daging sapi yang mencapai 96 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dinilai membuat stok daging sapi di dalam negeri sangat memprihatinkan. suplai daging sapi dari peternak secara nasional hanya mencapai 4 persen saja.

Indonesia tidak saja harus berinvestasi di sektor peternakan di luar negeri, namun juga harus membangun dan mengembangkan ekosistem peternakan di dalam negeri. Langkah ini untuk menjaga kelangkaan sapi kedepannya. Saat ini, lanjutnya, budidaya sapi di peternak kurang maksimal. Perkaranya hewan ternak subfamili bovinæ ini kerap dipotong para peternak tanpa mempertimbangkan perkembangbiakannya. Pomotongan sapi masif terjadi saat harga daging di pasaran melambung tinggi.

Menteri BUMN menyampaikan rencana membeli peternakan sapi di Belgia melalui BUMN sektor peternakan. Rencana tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi pasokan daging sapi di Indonesia. Langkah pembelian peternakan itu juga diyakini mampu menekan impor daging sapi.

Selama ini impor masih menjadi upaya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

4. Harga Daging Sebelumnya Sempat Melambung Tinggi Hingga Mencapai Rp160 Ribu Per Kg. Salah Satu Faktor Kenaikan Adalah Hanya Bergantung Pada Pasokan Daging Yang Diimpor Dari Australia.

(<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00419324.html>)

Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengimpor daging dari Australia sebanyak 122,86 ribu ton senilai USD389,04 juta atau setara dengan Rp588,86 triliun. Indonesia sangat bergantung kepada Australia, sehingga ketika ada gejolak produksi sapi di Australia, maka Indonesia mendapatkan imbasnya. Di Australia sendiri saat ini diketahui populasi sapi sedang menurun imbas kekeringan.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2022 ini, akan mengimpor daging sapi Brasil sebanyak 20 ribu ton. Hal ini dilakukan guna memastikan pasokan kebutuhan konsumsi nasional tercukupi. Rencananya impor daging sapi dari Brasil tersebut mulai masuk Indonesia pada Mei 2022 mendatang.

5. Impor Daging Tanpa Rekom Kementan

(<http://agroindonesia.co.id/impor-daging-tanpa-rekom-kementan/>)

Pemerintah membuat keputusan berani dengan membuka keran impor daging sapi dan kerbau dari semua negara untuk menstabilkan harga daging, tanpa perlu rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022, impor produk hewan, terutama daging kerbau, juga terbuka untuk swasta, tak lagi monopoli BUMN.

Berdasarkan PP No. 11/2022 tentang Perubahan atas PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, ketentuan pasal 7 diubah. Jika semula impor produk hewan hanya monopoli BUMN (Perum Bulog dan PT Berdikari), kini swasta pun boleh mengimpor setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, frase 'persyaratan tertentu' ini ternyata domain Kementerian Perdagangan, yang akan diturunkan dalam peraturan menteri.

Yang menarik, pasal 7 di PP 11/2022 juga tidak lagi mencantumkan rekomendasi pemasukan (impor) yang diterbitkan menteri pertanian. Padahal, sesuai PP 4/2016, BUMN yang ditugaskan mengimpor harus punya rekomendasi menteri pertanian. Itu sebabnya, PP 11/2022 mendapat kritik tajam dari pengamat peternakan, yang juga dokter hewan, Sofjan Sudarjat. Mantan Dirjen Peternakan ini menilai impor hewan dan produk hewan tanpa rekomendasi teknis sangat berbahaya buat kelangsungan ternak di dalam negeri.

6. Badan Pangan Nasional: Produksi Kedelai hanya cukup buat 1 bulan, perlu impor 2,8 juta ton

<https://money.kompas.com/read/2022/03/31/133100626/badan-pangan-nasional--produksi-kedelai-hanya-cukup-buat-1-bulan-perlu-impor-2>

Badan Pangan Nasional (BPN) mengungkapkan, keperluan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan tahun 2022 mencapai 2,84 juta ton.

Sekretaris Utama BPN, Sarwo Edhy menyebut, impor diperlukan lantaran produksi kedelai dalam negeri hanya cukup untuk satu bulan. BPN memperkirakan, produksi kedelai dalam negeri hanya mencapai 200.315 ton, sementara kebutuhan bulanan hanya 248.626 ton.

Sarwo menjelaskan, total ketersediaan kedelai saat ini mencapai 391.285 ton, dengan rincian stok awal tahun 2022 sebesar 190.970 ton dan perkiraan produksi dalam negeri mencapai 200.315 ton. Hingga akhir tahun 2022, kebutuhan kedelai diperkirakan mencapai 2,98 juta ton. Tak heran, kebutuhan impor kedelai melonjak mencapai 2,84 juta ton.

7. Harga Kedelai Dunia Naik, Importir Jamin Stok Dalam Negeri

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220330/12/1517037/harga-kedelai-dunia-naik-importir-jamin-stok-dalam-negeri>

Berdasarkan catatan otoritas perdagangan, harga kedelai di pasar dunia sudah menembus di angka Rp8.875 per kilogram pada 25 Maret 2022 atau naik 95,6 persen dari posisi Rp4.526 per kilogram secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sementara porsi impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional mencapai 90 persen.

Konsekuensinya, harga paritas impor kedelai telah mencapai Rp11.649 per kilogram dan harga yang diterima pengrajin dari Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) rata-rata sebesar Rp12.284 per kilogram.

Berdasarkan data Akindo per 22 Maret 2022, stok kedelai dalam negeri sebesar 280.000 ton dengan ketahanan mencapai 1,4 bulan. Perinciannya, stok tersedia di gudang impor sebanyak 130.000 ton dan yang bakal masuk ke Indonesia sebesar 150.000 ton.

8. Selamatkan Perajin Tahu, Pemerintah Subsidi Harga 200 Ribu Ton Kedelai
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi bagi harga kedelai dengan jumlah 200 ribu ton.
9. Petani Gula Ingatkan Pemerintah Segera Habiskan Stok Gula Impor

(<https://www.beritasatu.com/ekonomi/911475/petani-gula-ingatkan-pemerintah-segera-habiskan-stok-gula-impor>)

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera menghabiskan stok gula konsumsi impor sebelum musim giling tahun 2022 dimulai, guna menjaga stabilitas harga gula petani.

Selain itu, DPN APTRI juga mendesak pemerintah untuk menugaskan importir gula agar membeli gula petani pada musim giling tahun 2022 agar harga gula petani tetap terjaga.

DPN APTRI juga menyampaikan usulan kepada pemerintah agar menaikkan besaran harga pokok pembelian (HPP) gula petani menjadi Rp 12.000 per kilogram saat rapat konsultasi dengan Kementerian Perdagangan pada akhir Maret 2022.

Pasalnya, kata dia, HPP saat ini sebesar Rp 9.100/kg tidak menguntungkan petani dan jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP).

Tingginya biaya pokok produksi tersebut terjadi mengingat adanya kenaikan ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, tebang angkut, biaya irigasi, pestisida hingga beban biaya pupuk. Sedangkan pupuk yang digunakan petani tebu selain bersubsidi juga menggunakan pupuk nonsubsidi seiring pembatasan jatah pupuk subsidi.

Usulan HPP gula petani sebesar Rp 12.000/kg tersebut dianggap masih wajar agar petani mendapatkan keuntungan yang memadai dari usaha tani tebu selama 1 tahun. HPP tersebut juga dianggap tidak memberatkan konsumen.

Usulan lain yang diajukan kepada pemerintah, yakni terkait penghapusan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula. Menteri Perdagangan

menyambut baik aspirasi dari DPN APTRI. Pemerintah juga akan menindaklanjuti usulan tersebut dalam penetapan HPP gula tani sebelum musim giling mendatang.

10. KPPU Ungkap Harga Cabai Naik 27% Jelang Ramadhan

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220401184030-92-779160/kppu-ungkap-harga-cabai-naik-27-persen-jelang-ramadan>)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut harga cabai naik 27 persen menjelang Ramadhan. Cabai menjadi bahan pokok yang harganya meningkat terbesar, bersama dengan minyak goreng

11. Pasokan Berkurang Diduga karena Faktor Cuaca, Harga Cabai Merah Melambung Hingga Rp55 ribu/kg

(<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/03/pasokan-berkurang-diduga-karena-faktor-cuaca-harga-cabai-merah-melambung-hingga-rp-55-ribu-per-kg>)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil pantauan nasional terhadap 11 komoditas pangan menyambut Ramadhan 1443 H. Sebagian besar komoditas belum menunjukkan gejala kelangkaan, kecuali komoditas cabai merah. Pasokan cabai merah nasional mulai berkurang yang diduga disebabkan oleh faktor cuaca.